

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA

**(Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga
Kabupaten Lombok Utara 2019)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



OLEH :

MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH
NIM.21513A0053

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2020/2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA
(Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga
Kabupaten Lombok Utara 2019)

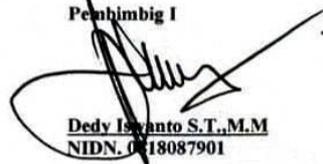


MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH
NIM: 21513A0053

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam Sidang skripsi
Mataram, 13 Februari 2021

Pembimbing I


Dedy Isyanto S.T.,M.M
NIDN. 0818087901

Pembimbing II

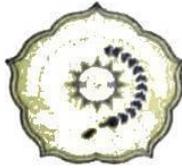

Ilham Zitri S.IP.,M.IP
NIDN. 0817119102

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Avatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN. 0816057902

PENGESAHAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA
(Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga
Kabupaten Lombok Utara 2019)**



**Di susun dan diajukan oleh
MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH
NIM: 21513A0053
PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN**

Telah di pertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 13 februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan tim penguji.

Tim Penguji,

1. <u>Ayatullah Hadi S.IP.,M.IP</u> NIDN. 0816057902	PN (..... <i>[Signature]</i>)
2. <u>Dedy Iswanto, S.T.,M.M</u> NIDN.0818087901	PU (..... <i>[Signature]</i>)
3. <u>Ilham Zitri S.IP.,M.IP</u> NIDN. 0817119102	PP (..... <i>[Signature]</i>)

**Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dehas**

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH

NIM : 21513A0053

Program Studi : Studi Pemerintahan

Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN
DESA (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan
Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penelitian ini merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari karya orang lain. Karya-karya yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian ini, semata-mata digunakan sebagai acuan atau referensi.
2. Apabila dikemudian hari skripsi ini saya terbukti saya merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung segala akibatnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

Mataram, 13 Februari 2020



Muhammad Izzudin Nasrullah
21513A0053

MOTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan, dengan bermodalkan yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat hidup”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya hingga terselesaikannya Skripsi ini.

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA

1. Kedua orang tua saya yang tidak habis-habisnya mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakak saya, adik saya dan semua keluarga besar saya yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
3. Dan tidak lupa terima kasih buat ibu bapak dosen pembimbing dan temen-temen saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara)”. Penyusunan Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan S1 Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lain berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, tanpa adanya dukungan dan motivasi dari mereka, mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan serta penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dedy Iswanto S.T.,M.IP selaku pembimbing utama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Ilham Zitri S.IP.,M.IP selaku pembimbing pendamping dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua saya ayah Rajono dan ibu saya Diwati yang selalu selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material atau spiritual hingga terselesaikannya laporan ini.
7. Kakak Saya Eni Nurdiana, Haeri Sutrisna dan Wildan Muzafar yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015.
9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan skripsi ini baik secara bahasa, penulisan dan materinya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata-katanya yang kurang dalam penulisan skripsi ini penulis mohon dimaafkan dan kritik serta saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah pengetahuan dan referensi.

Mataram, 13 Februari 2020

Muhammad Izzudin Nasrullah
NIM. 21513A0053

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)

OLEH

MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH

21513A0053

Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa di Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, dan faktor-faktor pendukung dalam pemekaran desa. Jenis Penelitian Deskriptif kualitatif melalui uraian-uraian yang menggambarkan atau menjelaskan subjek penelitian. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara dengan Teknik Analisa Data bersifat induktif dan deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data.Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pasrtisipasi masyarakat dalam pemekaran desa di Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sangat baik, hal tersebut dilihat dari antusias masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat serta dalam tahap evaluasi hasil. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kata Kunci: Partisipas., Masyarakat., Pemekaran Desa.

ABSTRACT

**PARTICIPATION OF THE COMMUNITY IN VILLAGE DEVELOPMENT
(Study of Rempek Darussalam Village, Gangga District
North Lombok Regency 2019)**

BY

**MUHAMMAD IZZUDIN NASRULLAH
21513A0053**

Expansion is simply a stepping stone for the welfare of the people in a given region, given that the aim of establishing a government is to ensure the welfare of the population. The State guarantees to promote public health and the intellectual life of the country in the preamble to the Constitution, so that it is a certainty for all government administrators to make their citizens more prosperous.

This research tried to evaluate community involvement in village expansion in Rempek Darussalam Village, Gangga District, North Lombok Regency, as well as supporting factors. Descriptions that characterize or illustrate the research topic are a type of qualitative descriptive research. Techniques for gathering data Inductive and informative data collection methods include observation, recording, and interviews with data analysis techniques. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions are all steps in the data analysis process.

The findings revealed that community involvement in the village division in Rempek Darussalam Village, Gangga District, North Lombok Regency was very high, as evidenced by the community's enthusiasm for the decision-making process, program implementation, profit distribution, and results in assessment level. The assistance they provide to the village government is an opportunity for the village government to meet their basic needs.

Keywords: *Participation, Community, Village Expansion.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Dasar Teori.....	11
2.2.1 Konsep Partisipasi	11
2.2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi	12
2.2.3 Tingkatan Partisipasi	15
2.2.4 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	18
2.2.5 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi ..	20
2.2.6 Faktor Penghambat Partisipasi	23
2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat.....	25
2.3.1 Bentuk-bentuk Masyarakat.....	26
2.4 Tinjauan Tentang Pemekaran Desa.....	30
2.4.1 Konsep Pemekaran	30
2.4.2 Konsep Desa	33

2.4.3 Bentuk-bentuk Desa	34
2.5 Kerangka Berfikir	36
2.6 Definisi Konseptual	37
2.7 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Informan.....	43
3.6 Responden.....	43
3.7 Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Rempek Darussalam	46
4.1.2 Visi Dan Misi Desa Rempek Darussalam.....	49
4.1.3 Data Penduduk Desa Rempek Darussalam	49
4.1.4 Akses Perhubungan Antar Desa.....	52
4.1.5 Kondisi Ekonomi Rempek Darussalam	54
4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Tahun 2019.....	55
4.2.1.1 Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan	55
4.2.1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program	59
4.2.1.3 Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	60
4.2.1.4 Partisipasi Dalam Evaluasi Hasil	63
4.3 Faktor Pendukung Pemekaran Desa.....	64
4.3.1 Batas Wilayah Desa Rempek Darussalam	65
4.3.2 Luas Wilayah Desa Rempek Darussalam	68
4.3.3 Sarana Dan Prasarana Desa Rempek Darussalam	71

4.3.4 Struktur Pengurusan Aparatur Desa Rempek Darussalam 75

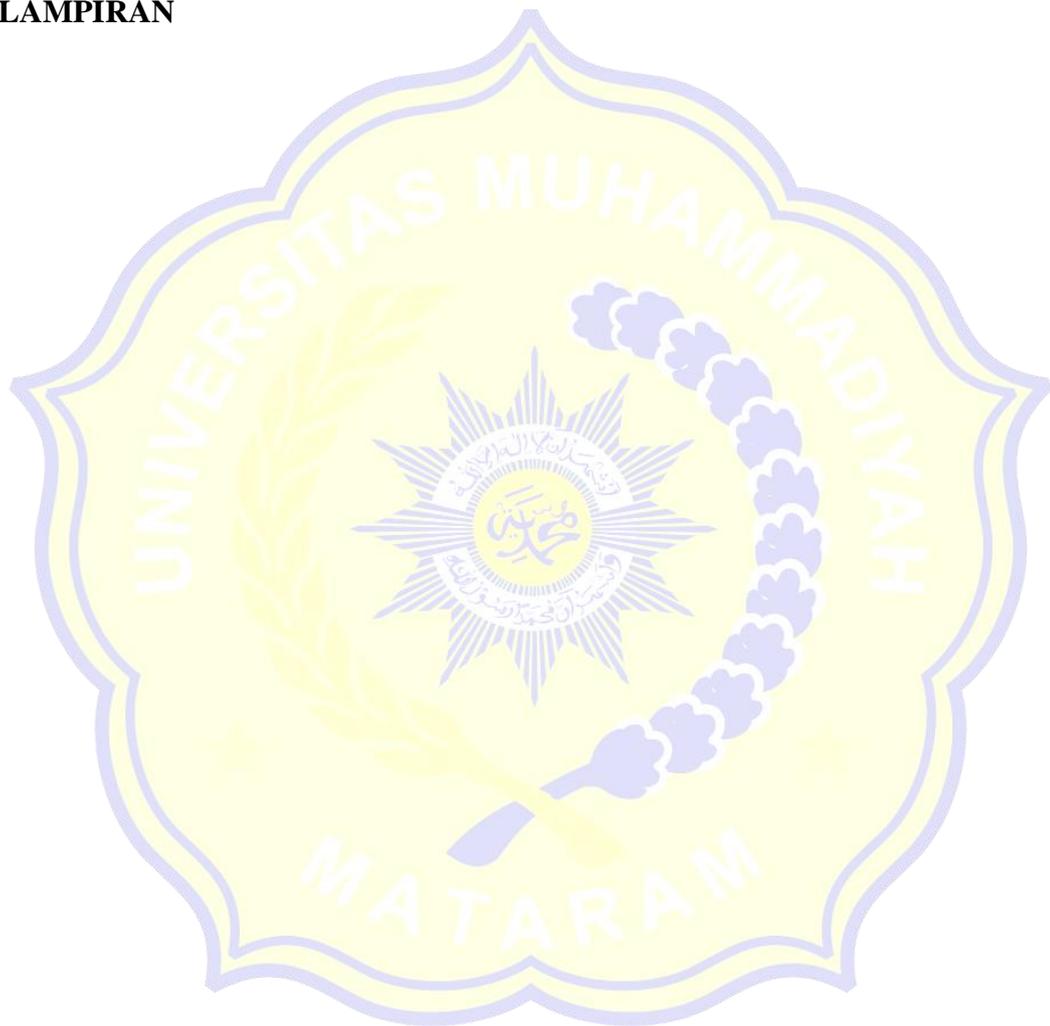
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77

5.1 Kesimpulan 77

5.2 Saran78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

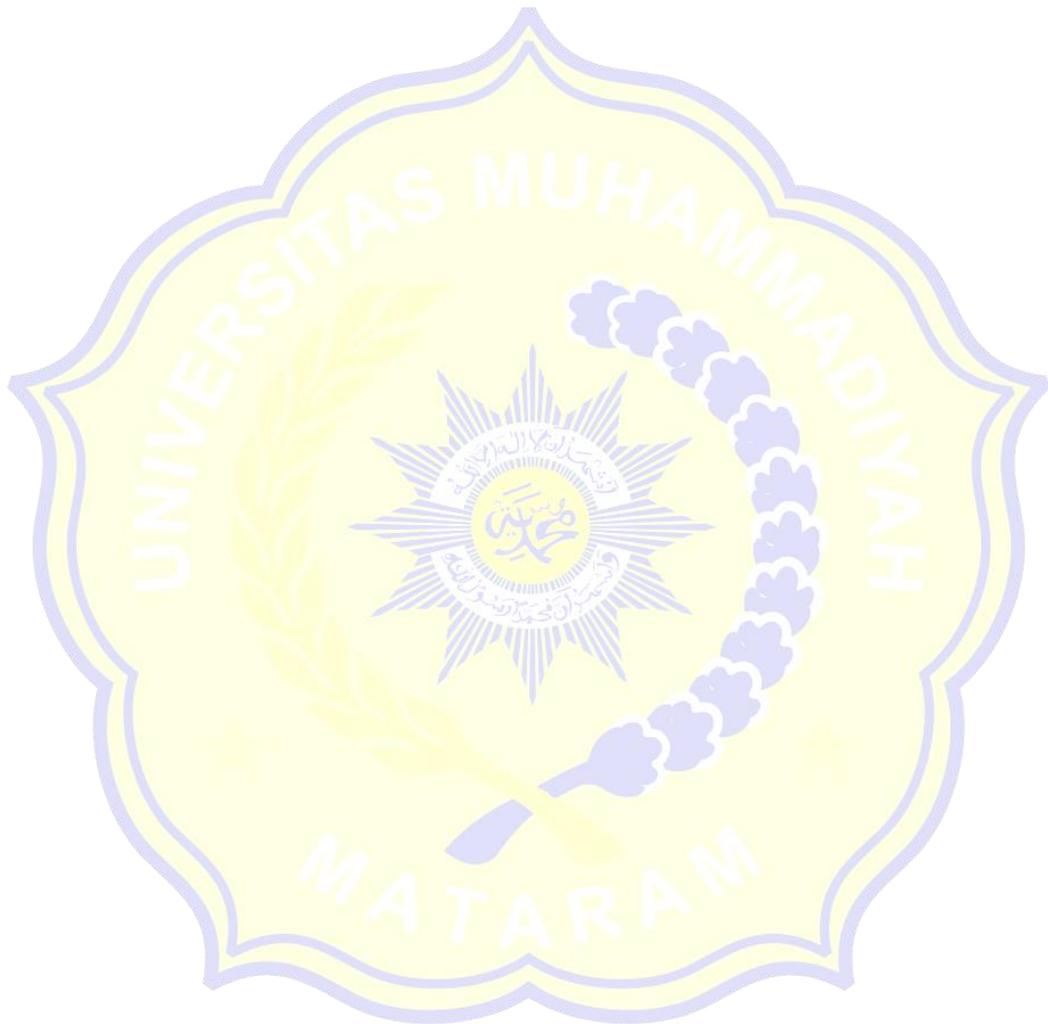


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Tangga Partisipasi menurut Arstein.....	16
Tabel 2.3 Tingkatan Partisipasi Menurut Peter Oakly.....	17
Tabel 2.4 Kerangka Berfikir	37
Tabel 2.5 Definisi Operasional	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	50
Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.4 Data Akses Antar Desa Rempek Darussalam.....	53
Tabel 4.5 Data Akses Antar Dusun Desa Rempek Darussalam.....	53
Tabel 4.6 Luas Wilayah Desa Rempek Dan Desa Rempek Darussalam Setelah Pemekaran Tahun 2020	69
Tabel 4.7 Jarak Perdusun Desa Rempek Darussalam Sebelum Pemekaran Ke Pusat Pemerintahan Desa.....	70
Tabel 4.8 Jarak Perdusun Desa Rempek Darussalam Setelah Pemekaran Ke Pusat Pemerintahan Desa.....	71
Tabel 4.9 Sarana Dan Prasarana Bangunan Fisik Desa Rempek Darussalam Tahun 2020	72
Tabel 4.10 Struktur Pemerintahan Desa Rempek Darussalam	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Daftar Hadir Musyawarah Desa Dalam Rangka Membahas Pemekaran Desa Rempek Darussalam	58
Gambar 2 Peta Desa Rempek Darussalam.....	68



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah berhak untuk menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Mataram dan memiliki 10 kabupaten dan kota. Dua pulau terbesar di provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pulau Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa terletak di timur. Pulau Lombok memiliki 5 Kabupaten atau kota di antaranya Kabupaten Lombok timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Utara Kecamatan Gangga desa Persiapan Rempek Durassalam dalam rangka melihat partisipasi masyarakat untuk membangun pemekaran desa.

(www.ntb.bps.go.id)

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di wilayah kota maupun di pedesaan. Karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh

dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam suatu perencanaan atau program yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri, keberhasilan suatu program tanpa partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan atau suatu program, agar program berjalan dengan mestinya. Program yang sudah direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sangat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Agar pembangunan berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk menjalankan aktivitas pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan sama strategi yang diterapkan adalah melalui strategi penyadaran.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan*

pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(www.dpr.go.id)

Pemekaran desa secara teoritis dapat dikatakan sebagai suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran desa di Indonesia adalah pembentukan wilayah baru di tingkat kota maupun kabupaten induknya.

Secara normatif terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemekaran wilayah yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi pemekaran wilayah. Prasyarat yang dimaksud menjelaskan mengenai prasyarat administratif, syarat teknis, dan fisik kewilayahan dalam pemekaran suatu wilayah sebagaimana pasal 5 UU No 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999.

Pemekaran desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (dana add), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pada pembangunan pada jangka panjang.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan suatu daerah tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu dalam menjalankan atau menyelenggarakan otonomi daerah dengan demikian daerah yang dibentuk daerah induknya harus mampu menjalankan atau menyelenggarakan otonomi daerah sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari pemekaran yaitu pelayanan dan kesejahteraan baik bagi daerah yang dimekarkan atau daerah induknya. Pemekaran sejatinya menjadi batu loncatan bagi kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat dari berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara menjamin untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah menjadi kepastian bagi segenap penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Desa Rempek Darussalam adalah desa yang baru dimekarkan dari wilayah Desa Rempek, sehingga sebagian nama dari nama desa ini masih diambil dari nama desa induknya yaitu Desa “REMPEK“ menjadi Desa “REMPEK DARUSSALAM”. Desa Rempek Darussalam telah memenuhi semua aspek yang disyaratkan untuk suatu daerah yang akan dimekarkan, seperti luas wilayah,

potensi daerah, jumlah penduduk, kemampuan ekonomi, dan pertimbangan lain yang memungkinkan daerah tersebut dimekarkan, seperti ketertiban dan keamanan, sosial, budaya dan politik. (*profil Desa Rempek Ddarussalam*)

Desa Rempek Darussalam memiliki luas wilayah kurang lebih 1.170 Ha² dengan wilayah pemerintahan sebanyak 7 dusun, di antaranya; Dusun Rempek, Dusun Rempek Timur, Dusun Pancor Getah, Dusun Busur Barat, Dusun Busur, Dusun Jelitong, dan Dusun Kuripan. Dari luas wilayah yang dimiliki Desa Persiapan Rempek Darussalam sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan yaitu sawah irigasi teknis 5 Ha, Kebun Kakao 1.450 Ha, Kebun Kopi 525 Ha, Kebun Kelapa 221 Ha, Kebun Cengkeh 25 Ha, Kebun Pisang 1.164 Ha, Kebun Panili 2 Ha, Kebun Manggis 5 Ha, Kebun Menté 11 Ha, Kebun Durian 51 Ha, Kebun Rambutan 9 Ha dan lainnya. (*profil Desa Rempek Darussalam*)

Pemekaran Desa Rempek Darussalam harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan UU No.6 Tahun 2014 tentang prosedur pemekaran Desa.

Melihat dari pembahasan diatas maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang masalah “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah:

1. Sejauh Manakah Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 ?
2. Apa Faktor-faktor Pendukung Pemekaran Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Apa Faktor-faktor Pendukung Pemekaran Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi studi pada program studi Ilmu Pemerintahan dalam Jenjang Studi Strata Satu (S-1)
2. Secara Praktis, skripsi ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi keberlangsungan pemekaran Desa Rempek Darussalam, serta dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi wawasan masyarakat serta pemerintah desa dalam membangun desa menjadi lebih maju.
3. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan acuan baru bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah dibuat dan dianggap cukup relevan serta untuk mencari perbandingan terlebih untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. 1	
Tahun	Aris Setiawan, 2016
Judul	Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokarto Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Hasil	Dari hasil penelitian mengenai Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Wonokarto dapat dilihat dari 1) adanya pemberdayaan masyarakat, 2) adanya peningkatan pembangunan dan infrastruktur desa dan, 3) pelayanan publik menjadi lebih baik, sehingga dengan keadaan yang lebih baik tersebut masyarakat Desa Wonokarto menjadi lebih sejahtera.
Perbedaan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah pemekaran Desa Wonokarto Kecamatan

	Ngadirojo Kabupaten Pacitan, sedangkan dalam penelitian proposal skripsi ini penulis lebih fokus pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa.
No. 2	
Tahun	Nuraeni 2019
Judul	Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Hasil	Dampak dari pemekaran desa ini dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan yang cukup meningkat dari tahun sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran.
Perbedaan	Penelitian terdahulu lebih fokus pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Onemanu. Sedangkan dalam penelitian proposal skripsi ini penulis lebih fokus sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa
No. 3	
Tahun	Ardian Pribadi 2008
Judul	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemekran Desa (Studi di Desa Sumber brantas Sebagai Hasil Pemekaran Desa Tulungrejo

	Kecamatan Bumiaji Kota batu)
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Hasil	Persepsi masyarakat beserta pengurus BPD dan perangkat desa Sumberbrantas ini menyetujui tentang adanya kebijakan pemekaran desa Sumberbrantas. Kemudian persepsi masyarakat juga melihat dampak dan manfaat yang sangat positif bagi perkembangan desa Sumberbrantas sendiri.
Perbedaan	Subjek penelitian, fokus penelitian.
No. 4	
Tahun	Hanna Eka Puspitasari 2013
Judul	Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo, Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo, Jawa Timur)
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Hasil	Pemekaran desa belum semuanya sesuai dengan persyaratan yang ada antara lain persyaratan mengenai kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan sosial politik masih kurang. Setelah adanya pemekaran desa pelayanan publik sudah sesuai dengan kaedah pelayan publik yaitu aksestabilitas, teknikslitas, protabilitas dan akuntabilitas.

Perbedaan	<p>Penelitian terdahulu lebih fokus pada pemekaran desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus, sedangkan dalam penelitian proposal skripsi ini penulis lebih fokus pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa</p>
No. 5	
Tahun	Sarah Nuramalia Putri 2017
Judul	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Hasil	<p>Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian ide/gagasan 60,25% atau berada pada kategori tinggi, partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga 80% atau berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan dalam bentuk sumbangan material 78,6% atau dalam kategori tinggi dan dalam bentuk sumbangan dana 72,2% atau dalam kategori tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balesari tergolong tinggi dengan rata-rata skor 72,76%.</p>
Perbedaan	Subjek penelitian, fokus penelitian.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Konsep Partisipasi

Dalam proses pembangunan, partisipasi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Pembangunan masyarakat diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Oleh karena itulah partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu program atau proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi yang akan dikemukakan oleh beberapa ahli dibawah ini.

Bornby dalam Theresia (2014: 196), mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu, Adisasmita (2006: 34) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingannya sendiri dengan harapan adanya partisipasi ini tujuan yang telah disepakati bersama akan tercapai dengan maksimal. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan partisipasi adalah tindakan atau perilaku masyarakat Desa Persiapan Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara dalam proses pelaksanaan pemekaran desa. Keterlibatan tersebut akan menentukan keberhasilan suatu program.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Sementara itu, Cohen dan Uphoff dalam Sari (2016: 60), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat

menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui

apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan macam partisipasi, yaitu:

- a. partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan
- b. partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif

2.2.3 Tingkatan Partisipasi

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Wilcox dalam Theresia (2014:202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

1. Memberikan informasi (*information*).
2. Konsultasi (*consultation*); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

3. Pengambilan keputusan bersama (*diciding together*); dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Arstein dapat dibedakan dalam anak tangga sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tangga Partisipasi menurut Arstein

Klasifikasi	Uraian	Tingkatan
<i>Citizen Power</i>	Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan	<i>Kontrol masyarakat (citizen control)</i> Pelimpahan kekuasaan (<i>delegated control</i>) Kemitraan (<i>partnership</i>)

<i>Tokenism</i>	Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Penetraran (<i>placation</i>) Konsultasi (<i>consultation</i>) Informasi (<i>information</i>)
<i>Non Participation</i>	Masyarakat hanya dijadikan objek	Terapi (<i>therapy</i>) Manipulasi (<i>manipulation</i>)

(Sumber: Arstein dalam Sari 2016:63)

Tabel 2.3 Tingkatan Partisipasi Menurut Peter Oakly

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indokrinasi.
<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan
<i>Consensus Building</i>	pada tingkat ini <i>stakeholder</i> berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahannya adalah individu-individu atau kelompok yang masih cenderung diam atau bersifat pasif.

<i>Decision Making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
<i>Partnership</i>	Memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. Equal tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
<i>Self management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal0hal yang menjadi perhatian.

(sumber: Dwiningrum dalam Tsanita 2016:12)

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Pangestu (1995) dalam febriana (2008) menyebutkan faktor utama yang dapat mempengaruhi partisipasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam

suatu kegiatan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola dan pihak proyek dengan ssaran.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi mayarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angel (1967) seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam partisipasi, yaitu:

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur”

yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik,

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Partisipasi

Slamet dalam Theresia (2014: 207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Sementara itu, Najib dalam Tanuwijaya (2016: 7) menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.
- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.

- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

2.2.6 Faktor Penghambat Partisipasi

Soetrisno dalam Theresia (2014: 211) mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

1. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - a) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatus) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - b) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - c) Partisipasi masyarakat sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup dikomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
3. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Sementara itu, Dwiningrum (2011: 57) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan ditingkat anggota masyarakat
- b. Aspek-aspek tipologis
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- d. Demografis (jumlah penduduk)
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Sementara Solekhan (2012: 135), mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat)saja tetapi juga berupa forum

pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) namun dalam pelaksanaan cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewedahi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Melemahnya modal sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012: 139), modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan dalam konteks interaksi sosial.

2.3 Tinjauan Tentang Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Komunitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi

antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Konstinitas Wktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2006 : 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Sedangkan menurut Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (dalam Abu Ahmadi: 2003: 97).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dalam suatu wilayah tertentu dan saling bekerja sama, memiliki pembagian kerja sehingga mereka dapat berorganisasi serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan, trdisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Soemardjan dalam Soekanto (1993: 49) masyarakat di Indonesia di bagi menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan

masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adanya ciri-ciri utama dari masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Sederhana

- a. Hubungan dalam keluarga dan dalam warga setempat sangat kuat.
- b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
- c. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen.
- d. Tingkat buta huruf relatif tinggi.
- e. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dipahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa.
- f. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali.

- g. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dan majikan.

2. Masyarakat Madya

- a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
- b. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar.
- c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka dalam kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah.
- d. Didalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
- e. Tingkat buta huruf relatif turun.
- f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
- g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat dan uang semakin meningkat peranannya.

- h. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

3. Masyarakat pra modern/modern

- a. Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi.
- b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi.
- c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- d. Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
- e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata.
- f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks.
- g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi yang dilakukan oleh kelompok manusia yang telah bermukim cukup lama dan bekerja sama dalam suatu wilayah atau tempat tertentu. Serta didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.

2.4 Tinjauan Tentang Pemekaran Desa

2.4.1 Konsep Pemekaran

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1) berkembang menjadi terbuka 2) menjadi besar dan gembung 3) menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus 4) mulai timbul dan berkembang. Definisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah menjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru akan tetapi pemecahan daerah otonom baru.

Menurut Poerwadarminta (2005), Pemekaran adalah suatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Widarta (2005: 25) terdapat beberapa alasan

kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru dimekarkan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Pengembangan daerah baru otonom, memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan.

Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa pembentukan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kk.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kk.
 - c. Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kk.
 - d. Wilayah Sulawesi selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kk.
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kk.
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk.
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kk.
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kk.
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kk.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam pelayanan di pembinaan masyarakat.
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan

7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemekaran merupakan pemisahan atau pembagian wilayah menjadi wilayah baru, dimana akan menciptakan pemerintahan baru dan struktur baru guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan pembangunan.

2.4.2 Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *Deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa menurut Widjaya (2005: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Selanjutnya widjaya (2005: 3) menyatakan bahwa landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menegaskan bahwa “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri, dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Desa

Bentuk-bentuk desa menurut Sugihen (2010) adalah:

a. Desa Sederhana (pra desa)

Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya sebagai tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya akan ditinggalkan lagi. Pola permukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. Hampir tak ada orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, karena semua penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila lahan sebagai sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang memadai. Sifat permukiman yang demikian tidak memungkinkan tumbuhnya atau berkembangnya berbagai tata kehidupan dan organisasi atau lembaga-lembaga sosial penunjang kehidupan bermasyarakat termasuk pendidikan, ekonomi, adat, dan hubungan sosial disamping tata kemasyarakatan yang mantap.

b. Desa Swadaya

Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang bermukiman secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih tradisional dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya masih berkaitan erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, berternak dan memelihara ikan di tambak-tambak kecil. Teknologi pertanian yang dipakai masih rendah, tenaga hewan dan manusia merupakan sumber utama energi teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) sering didasarkan dan diikat oleh adat istiadat yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator tipologi desa itu belum berkembang dan desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang memadai dan kurang terpelihara.

c. Desa Swakarya

Pada desa ini, adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Lapangan pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripada desa swadaya.

d. Desa Swasembada

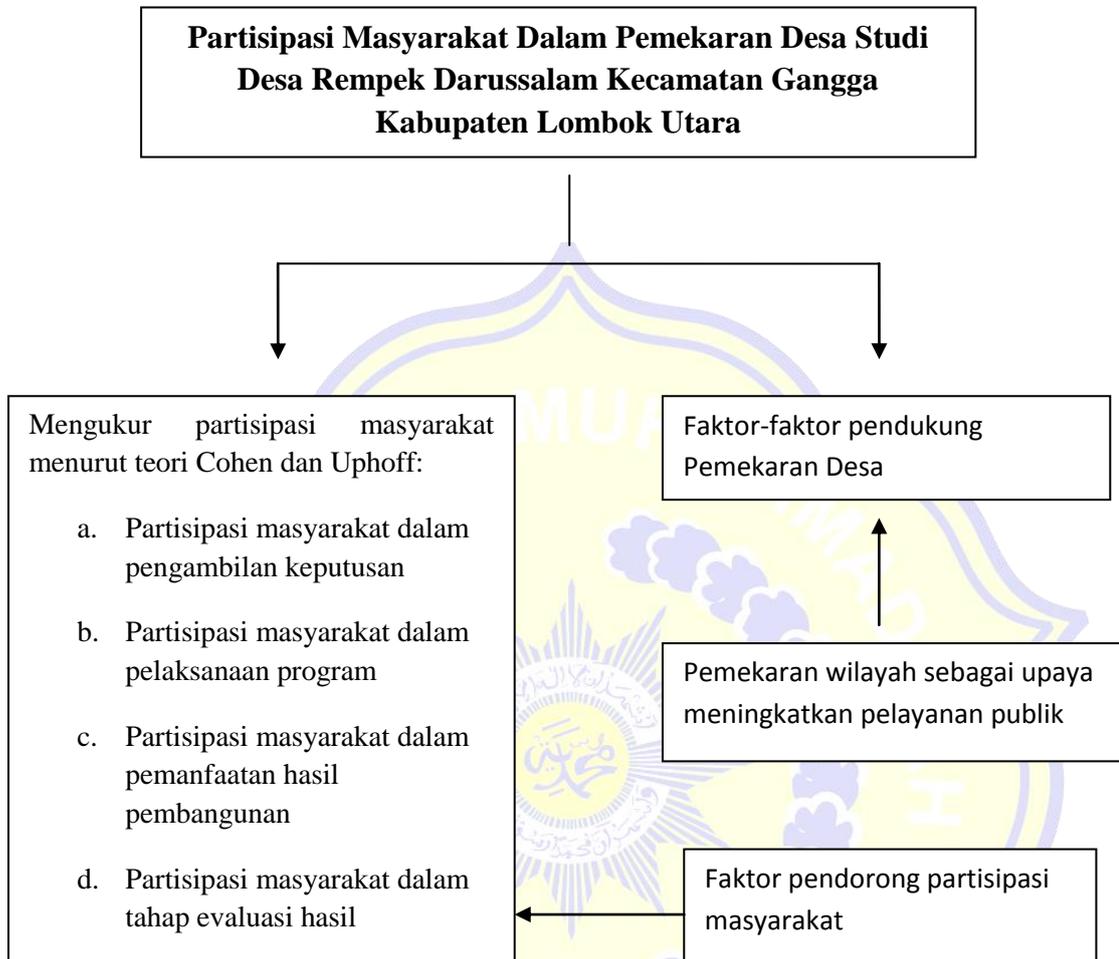
Desa Swasembada merupakan pola desa yang terbaik dari bentuk-bentuk desa yang terdagulu. Prasarana desa sudah baik, bentuk rumah sudah

bervariasi dan memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian sudah sangat bervariasi dan kebanyakan masyarakatnya tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang diusahakan sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka dengan masyarakat diluar desanya. Pengaruh dari luar itu terlihat dalam perilaku orang-orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih walaupun belum merata. Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak masyarakat yang menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan pesawat televisi warna dengan antena parabola. Serta banyak masyarakat yang sudah berpendidikan sarjana.

2.5 Kerangka Berfikir

Paradigma pembangunan saat ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam hal pembangunan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti dana, tenaga, dan keaktifan waktu serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka menyumbangkan ide bagi kepentingan pembangunan.

Tabel 2.4 Kerangka Berfikir



Tabel 2.4. Kerangka Berfikir

2.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman didalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara**”, antara lain:

1. Konsep Partisipasi

Cohen dan Uphoff dalam sari (2016:60), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu 1) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 2) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 3) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan 4) partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi hasil.

2. Konsep pemekaran

Menurut Widarta (2005; 25), pemekaran wilayah sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

2.7 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu, definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur

atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berfikir peneliti, dapat dilihat dari tabel 4 dibawah ini.

Tabel 2.5 Definisi Operasional

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Konsep Partisipasi	Pengambilan keputusan	Kehadiran dalam rapat, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan masyarakat.
		Pelaksanaan program	Perencanaan, pelaksanaan, tujuan program
		Pemanfaatan hasil	Menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada di desa.
		Evaluasi hasil	Mengawasi dan mengontrol setiap perencanaan pembangunan yang akan berjalan.
2	Konsep Pemekaran	Faktor_faktor pendukung Pemekaran Desa	Batas Wilayah
			Luas Wilayah
			Prasarana Pembangunan
			Persiapan Struktur

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang otentik dari pengalaman orang – orang yang berhubungan erat dengan topik penelitian, yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Sedangkan menurut David Williams dalam Moleong, (2014:5) bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data ilmiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah, jelas definisi ini memberikan gambaran penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian ilmiah.

Adapun pendekatan yang di gunakan dalam penelitian yaitu dengan melakukan pendekatan deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan atau menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang di kumpulkan adalah data kualitatif, yakni tidak menggunakan alat pengukur. Metode data deskriptif baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. (moleong, 2013:63)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat penting untuk memperoleh data dalam hal penulisan karya ilmiah, oleh karena itu dalam rencana penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian di Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Mengingat lokasi ini merupakan tempat tinggal peneliti secara tidak langsung peneliti cukup kenal dengan wilayah ini sehingga di harapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat setempat.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

1. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini data dari hasil wawancara dan observasi.
2. Sumber data sekunder dalam hal ini berupa data sumber lain atau catatan-catatan dari lapangan berupa dokumen-dokumen.

3.4 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau melihat peristiwa/gejala-gejala yang timbul, berkaitan dengan apa

yang diteliti secara langsung (Sukarumidi, 2004;26). Adapun teknik observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan dengan maksud menjaring data-data yang diperlukan agar peneliti memperoleh data yang valid, karena langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian yakni Desa Rempek Darussalam.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, legger, notulen, rapat agenda dan lain sebagainya. (arikunto, 2001;206).

Sedangkan menurut Husnaini Usman (2009; 91) “Dokumentasi yaitu mengutip bahan atau data visual yang ada kaitannya dengan pokok bahasan permasalahan”. Jadi peneliti dapat menyimpulkan dokumen yaitu mengumpulkan data dengan cara mengutip dari dokumen-dokumen atau sumber lain yang sudah jadi yang berkaitan dengan obyek dan keperluan penelitian.

3. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan untuk menjaring informasi dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan. Pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan

keterangan baik itu dari subyek maupun informan, tokoh masyarakat, BPD, Sekdes, Kades.

3.5 Informan

Menurut Moleong (2006;132) dalam buku metode penelitian kualitatif, informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang masalah.

Selain itu menurut Andi (2010;147) dalam buku menguasai teknik teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa, informan adalah orang yang di perkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

3.6 Responden

Menurut Suharsimi Arikunto, Responden adalah orang orang yang merespon atau menjawab pertanyaan dari peneliti baik pertanyaan tulisan maupun lisan. (2003;10). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penentuan responden adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan orang-orang yang ditunjuk untuk menjawab dan memberikan keterangan terhadap masalah yang di teliti baik secara tulisan maupun lisan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu pertama dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Kedua adalah *Snow Ball Sampling*, Neuman (2003) menyatakan sampel pada teknik ini diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan

lainnya. Adapun jumlah sumber data dan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yaitu sebagai berikut;

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 orang |
| 2. Bendahara Desa | : 1 orang |
| 3. Sekertaris Desa | : 1 orang |
| 4. Kepala BPD | : 1 orang |
| 5. Tokoh Masyarakat | : 7 orang |
| 6. Ketua Panitia Pemekaran Desa | : 1 orang |
| 7. Masyarakat Desa | : 3 |

3.7 Metode Analisis Data

Instrumen data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, maka analisa dilakukan adalah bersifat induktif dan deskriptif. Proses analisa dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun observasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan proses penafsiran data (Moleong, 2003; 190). Dari uraian data diatas, maka proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu;

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan, perhatian dan penyederhanaan data kasar yang diambil dari lapangan.
2. Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan pernyataan informasi menjadi konsep rasional dengan kenyataan sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan.
3. Menarik suatu kesimpulan.

Dengan analisis data yang bersifat induktif diharapkan dapat dirumuskan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran Desa Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019. Dalam penelitian ini akan menguji keabsahan data menggunakan 2 kriteria yang ada, yaitu;

1. Konfirmabilitas atau kepastian

Kriteria dengan perekaman pada data dan informasi serta interpretasi yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan. Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan ini, peneliti akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data bahan mentah (catatan lapangan dan transkrip wawancara), hasil rekaman (dokumen dan foto), hasil analisis data (rangkuan dan konsep-konsep), dan catatan tentang proses penyelenggaraan (metodologi, strategi, dan usaha keabsahan).

2. Transferabilitas atau keteralihan

Transferabilitas artinya bahwa hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau transfer kepada konteks lain, dengan teknik ini, peneliti akan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. Dengan uraian rinci ini terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.